

	News Title : Bappebti: Investor Bertransaksi Aset Kripto Terdaftar Dapat Perlindungan Regulasi	
	Media Name : investor.id	Journalist : Gora Kunjana
	Publish Date : 14 February 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 90,000,000
	Resources : Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI), Tirta Karma (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti), Ketua Satgas Waspada ITongam L. Tobing (nvestasi OJK)	Ads Value : 30,000,000
	Section/Rubrication : Market Corporate	Topic : kripto

Bappebti: Investor Bertransaksi Aset Kripto Terdaftar Dapat Perlindungan Regulasi

Senin, 14 Februari 2022 | 15:53 WIB
 Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan bahwa transaksi dan perdagangan aset kripto terdaftar memiliki jaminan sebagaimana regulasi yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Bappebti menanggapi sikap sejumlah pihak yang menyoroti keberadaan perdagangan kripto sebagai investasi berisiko dan sarat penipuan.

Salah satunya pernyataan yang disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, yang mengimbau kalangan milenial memilih opsi lain dalam berinvestasi.

Dia menyorot karakter fluktuatif dari kripto yang berpotensi merongrong stabilitas keuangan. Terlebih lagi, pengguna kripto mengalami lonjakan drastis dalam beberapa tahun belakangan.

Baca juga: [Ini Dua Kesalahan Terbesar Investor Aset Kripto](#)

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma meluruskan bahwa kripto yang disahkan di Indonesia bukan sebagai alat pembayaran, melainkan berperan sebagai komoditi. Singkatnya, tidak ada potensi untuk merusak stabilitas keuangan.

"Perlu diluruskan bahwa sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang bahwa alat pembayaran yang sah di dalam negeri adalah Rupiah, sehingga sistem keuangan nasional tetap menggunakan rupiah. Adapun aset kripto di dalam negeri dikategorikan sebagai komoditi sesuai Undang-undang No 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi," kata Tirta melalui keterangan tertulis, Senin (14/2/2022).

Selain itu, dia menjelaskan bahwa sebagai komoditi untuk investasi, tiap aset kripto mempunyai karakter berbeda fluktuasinya.

"Maka kami menetapkan jenis aset kripto yang layak diperdagangkan yang sudah dilakukan penilaian sesuai ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2020."

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma meluruskan bahwa kripto yang disahkan di Indonesia bukan sebagai alat pembayaran, melainkan berperan sebagai komoditi. Singkatnya, tidak ada potensi untuk merusak stabilitas keuangan.

"Perlu diluruskan bahwa sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang bahwa alat pembayaran yang sah di dalam negeri adalah Rupiah, sehingga sistem keuangan nasional tetap menggunakan rupiah. Adapun aset kripto di dalam negeri dikategorikan sebagai komoditi sesuai Undang-undang No 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi," kata Tirta melalui keterangan tertulis, Senin (14/2/2022).

Selain itu, dia menjelaskan bahwa sebagai komoditi untuk investasi, tiap aset kripto mempunyai karakter berbeda fluktuasinya.

"Maka kami menetapkan jenis aset kripto yang layak diperdagangkan yang sudah dilakukan penilaian sesuai ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2020."

Baca juga: [Kemendag Perketat Pengawasan Aset Kripto, Gara-gara Token ASIX Anang-Ashanty?](#)

Di sisi lain, Bappebti sebagai otoritas yang mengawasi, berkomitmen memberikan jaminan keamanan perdagangan aset kripto, karena itu ada kewajiban pedagang aset kripto harus terdaftar.

"Sesuai Perbappebti No 8 Tahun 2021 termasuk nantinya pembentukan bursa kripto beserta kliring dan kustodi untuk memudahkan pelaporan transaksi, penjaminan keuangan dan aset kriptonya sendiri," jelas Tirta.

Layanan bank



Tongam L. Tobing. Foto: IST

Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing mengklarifikasi bahwa OJK tidak melarang perbankan untuk melayani transaksi keuangan pedagang aset kripto.

"Perbankan tetap melayani transaksi jasa keuangan nasabahnya. Sebagai lembaga intermediasi, bank menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit. Pedagang aset kripto atau investor tetap difasilitasi bank untuk kelancaran transaksi keuangannya maupun untuk kebutuhan pendanaan," ungkapnya.

Baca juga: [Cara Trading Aset Kripto Saat Tren Bullish, Berikut Strateginya!](#)

Klarifikasi itu berkaitan dengan pernyataan sebelumnya yang dinilai merupakan pelanggaran dari OJK kepada perbankan untuk tidak memfasilitasi transaksi kripto. Padahal, kata Tongam, maksud OJK adalah melarang bank menggunakan atau memfasilitasi perdagangan aset kripto.

"Larangan ini merupakan amanat UU Perbankan. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan diatur jenis usaha bank. Di sana tidak ada diatur kegiatan usaha perdagangan komoditi. Dalam Pasal 10 UU tersebut diatur juga bahwa bank dilarang melakukan kegiatan usaha selain yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Bank dilarang misalnya menjadi agen penjual bitcoin, atau menempatkan aset dalam bentuk bitcoin," tukas Tongam.

Karena itu, dia meminta bahwa pernyataan larangan bank memfasilitasi perdagangan aset kripto, jangan disalahartikan. "[Ini bukan berarti] bahwa bank tidak melayani transaksi keuangan pedagang aset kripto," tegas Tongam.